

PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, LAJU INFLASI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL

Ade Olivia Sari¹⁾, Yeni Widyanti²⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
email: adeoliviana123@gmail.com¹, yeniwidyanti@binadarma.ac.id²,

Abstract

The consequence of regional autonomy is that each region was guided to finance its own regional development by increasing local revenue (PAD). Hotel tax was one of the Regional Original Revenues (PAD). Hotel tax revenue in the city of Palembang contributes well in the government's efforts to increase local revenue (PAD). This study aims to analyze the effect of the number of tourists, number of hotels, inflation rate and per capita income on hotel tax revenue in the city of Palembang in 2014-2016. The data used is secondary data and data collection techniques in this study are documentation carried out on the Regional Tax Management Agency (BPPD) and the Palembang Central Statistics Agency (BPS). Based on the results of data analysis it is known that, the variable number of tourists has a negative influence and the inflation rate variable has a positive effect on hotel tax revenue in the city of Palembang, while the number of hotels and per capita income does not affect hotel tax revenue in Palembang City in 2014-2016.

Keywords : *Number of tourists, The hotel, Rate of inflation, Income per capita, Hotel tax revenue.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah terutama pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanaan dalam pembangunan, sehingga setiap daerah bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan untuk daerahnya. Pemerintah pusat melakukan suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan suatu kuasa untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan setiap daerah dapat bisa mempunyai kemampuan untuk mendanai sendiri pembangunan daerahnya sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Kemandirian di suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat tersebut. Menurut Perda kota Palembang No.3 Tahun 2011 bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk bisa mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berlakunya otonomi daerah dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan pemasukan lain yang berasal dari daerah yang sah yang bertujuan memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan yang berasal dari daerah dalam melaksanakan suatu otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak hotel termasuk sebagai bagian dari PAD sebagai pajak daerah.

Beberapa kota besar di Indonesia menetapkan tarif 10% atas pajak hotel demikian juga halnya kota Palembang. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel:

Tabel. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi
2014	35.750.000.000	38.869.545.560
2015	51.200.000.000	52.282.900.123
2016	62.750.000.000	70.214.126.630

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di kota Palembang tahun 2014-2016 selalu melebihi target penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel di kota Palembang secara potensial mendukung PAD. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi adalah pajak hotel. Dengan tarif 10% pajak hotel ini ternyata mampu memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan pajak hotel khususnya kota Palembang tahun 2014-2016, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya target dan realisasi penerimaan pajak hotel untuk tahun 2014-2016. Kota Palembang sering menjadi tuan rumah *event-event* nasional maupun internasional seperti, Musabaqah Tilawatil Quran Internasional dan Asean University Games 2014-2016. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan, pembangunan-pembangunan hotel di kota Palembang pun meningkat. Dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak hotel sehingga dapat lebih meningkatkan pajak hotel semaksimal mungkin dalam menompang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, dan mandiri untuk pembangunan ekonomi daerahnya sendiri.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut undang-undang No.34 Tahun 2004 Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel.

Jumlah Wisatawan

Istilah wisata sangat berhubungan dengan perjalanan wisata yang merupakan suatu perubahan tempat tinggal seseorang secara sementara di luar tempat tinggalnya (Wihoho, 2006:24). Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata disebut juga (*tourist*) apabila tinggal kurang lebih 24 jam di suatu wilayah atau negara yang dikunjungi. Apabila kurang dari 24 jam, maka mereka disebut pelancong (*excursionist*) (Wihoho, 2006:24-25). Usaha mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung diperlukan pembangunan pariwisata yang mengarah pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah (wihoho, 1999:26).

Jumlah Hotel

Pemerintah Indonesia menurunkan peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan penggolongan hotel yang menyebutkan hotel adalah sebuah akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Menurut Sulistiyono (1999:12) hotel adalah suatu usaha jasa pelayanan yang rumit pengelolaannya, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa di pergunakan oleh tamu selama 24 jam. Usaha perhotelan bisa menunjang kegiatan para wisatawan dalam melaksanakan perjalanan untuk

mengunjungi daerah tujuan wisata dan tempat untuk menginap maka di pastikan pertumbuhan jumlah hotel di kota Palembang akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara terus menerus (*continue*) dan saling berpengaruh dalam suatu perekonomian suatu negara (Sukirno, 2012:340). Laju inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai jenis komoditas. Beberapa komoditas tersebut adalah bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tingkat daya beli umum yang mengacu pada kemampuan dari satuan moneter untuk membeli barang atau jasa dan juga di gunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala di lihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat di golongkan menjadi empat golongan yaitu, inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%-30% setahun, inflasi berat antara 30%-100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Dampak inflasi dapat bersifat menguntungkan atau merugikan, pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong perkebang ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika di tukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2012:423) adalah. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. dengan tinggi nya harga sewa hotel dengan fasilitas yang mewah di tetapkan sebagai perkembangan ekonominya, kondisi ini diperhitingkan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang di alami daerah bersangkutan yang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan di tunjukan dengan pendapatan per kapita, pendapatan per kapita tersebut menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya termasuk membayar pajak yaitu pajak hotel. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak tersebut dilihat dari 3 aspek yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besar nya pengeluaran konsumsi. Jika pendapatan perkapita seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak hotel dengan menginap di hotel tersebut.

Pendapatan Daerah

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong tingkat kunjungan wisatawan, tingkat pertumbuhan pembangunan hotel dan laju inflasi di Kota Palembang karena akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel sebagai PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Yani, 2007:13). Menurut peraturan daerah kota Palembang No 11 Tahun 2010, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak hotel sendiri merupakan pajak yang di kenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Subjek Pajak Hotel adalah badan atau orang pribadi yang melakukan pembayaran atas transaksi penggunaan jasa hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak

hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 kota Palembang, masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang yang sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang harus disampaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di jelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retbusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan negara bagi penduduknya secara perorangan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana di nyatakan dalam UU No. 33 Tahun 2004 mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Menurut undang-undang No.34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran yang wajib di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hasilnya di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah pajak menurut Sari (2013) memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Pajak sebagai fungsi penerimaan karena pajak merupakan sumber pemasukan dalam kas negara atau daerah dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sementara itu fungsi pengatur pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan).

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada empat jenis tarif pajak yang di bebaskan kepada masyarakat yaitu :

- a. Tarif proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang di gunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang di gunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak hotel yang datanya di peroleh langsung dari Badan Pengelola Pajak Daerah kota Palembang dan Badan Pusat Statistik kota Palembang tahun 2014-2016.

Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah Wisatawan

Usaha mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung diperlukan pembangunan kepariwisataan yang mengarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah (Wihoho, 1990:26).

b. Jumlah Hotel

Hotel merupakan usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamunya selama 24 jam (untuk bintang 4 dan 5). Usaha perhotelan dapat menunjang kegiatan para wisatawan dalam melakukan perjalanan mengunjungi daerah–daerah tujuan wisata dan membutuhkan tempat untuk menginap, makan dan minum serta hiburan (Sulistiyono, 20012:12). Jika kebutuhan akan hotel terus meningkat, maka dapat dipastikan pertumbuhan jumlah hotel di kota Palembang dipastikan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

c. Laju Inflasi

Inflasi akan menimbulkan efek–efek buruk seperti, Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang–orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga–harga maka inflasi akan menurunkan upah riil dari orang–orang yang berpendapatan tetap sehingga orang akan lebih cenderung melakukan saving pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012:339).

d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Sofian, 1997). Rumus dari pendapatan perkapita adalah (Eko, 2009) :

$$IPC_n = \frac{GNP_n}{P_n}$$

IPC_n : Income Per Capita (Pendapatan Per Kapita) tahun n

GNP_n : Gross National Product (Product Nasional Bruto) tahun n

P_n : Population (Jumlah Penduduk) tahun n

Produk Nasional Bruto dalah pendapatan total ekonomi suatu negara selama satu tahun, termasuk nilai produksi yang di hasilkan oleh penduduk dari negara tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Deskripsi data yang di maksud dalam penelitian ini adalah penyederhanaan data-data yang berhasil di kumpulkan kedalam data statistik. Untuk data jumlah wisatawan, jumlah hotel, laju inflasi dan pendapatan perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Palembang. Sedangkan penerimaan pajak hotel diperoleh dari Badan Pengelolah Pajak Daerah kota Palembang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel. 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17325695
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.555
Asymp. Sig. (2-tailed)		.918

Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

Berdasarkan pada tabel One-Sampel Kolmogrov residual di uji kembali dengan menggunakan uji *Kolomov Smirnov*. Pada tabel 2, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yaaitu *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,918 > 0,05$ maka persamaan ini memenuhi asumsi normalitas dan model regresi telah terdistribusi secara normal.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Berikut hasil uji regresi linier berganda untuk penelitian ini:

Tabel. 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant)	14.844	5.022		2.956	.006
	Jumlah Wisatawan	-.096	.034	-.440	-2.880	.007
	Jumlah Hotel	-.139	2.018	-.022	-.069	.946
	Laju Inflasi	.111	.054	.308	2.042	.050
	Pendapatan Perkapita	1.031	.910	.363	1.133	.266

Sumber: Data Diolah Penulis, 2018

Pada persamaan di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 14.844 Hal ini dapat diartikan konstanta penerimaan pajak hotel sebesar 14.844 menyatakan bahwa jika tidak ada jumlah wisatawan, jumlah hotel, laju inflasi dan pendapatan perkapita dianggap konstan maka penerimaan pajak hotel menjadi 14.844.

Koefisien regresi jumlah wisatawan sebesar -0,096 artinya setiap berkurang satu-satuan, maka variabel jumlah wisatawan akan berkurang sebesar -0,096 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi jumlah hotel akan berkurang sebesar -0,139 artinya setiap bertambah satu-satuan, maka variabel jumlah hotel akan berkurang sebesar -0,139 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi laju inflasi sebesar 0,111 menunjukkan bahwa apabila variabel laju inflasi bertambah sebanyak satu-satuan, maka variabel laju inflasi akan bertambah sebesar 0,111 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi pendapatan perkapita sebesar 1,031 menunjukkan apabila variabel pendapatan perkapita bertambah sebanyak satu-satuan, maka variabel pendapatan perkapita akan bertambah sebesar 1,031 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Wisatawan
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa jumlah wisatawan di terima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan pada tabel diatas memiliki t_{hitung} sebesar $-2.880 > 1.695 t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel.
- b. Variabel Jumlah Hotel
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa jumlah hotel di tolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari persamaan regresi linear berganda pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah hotel memiliki t_{hitung} sebesar $0,069 < 1.695 t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,946 > 0,05$. Hal ini berarti jumlah hotel tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.
- c. Variabel Laju inflasi
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa laju inflasi ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari persamaan regresi linear berganda pada tabel diatas diketahui bahwa laju inflasi memiliki t_{hitung} sebesar $2.242 > 1.695 t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,050 < 0,05$. Hal ini berarti laju inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.
- d. Variabel Pendapatan Perkapita
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pendapatan perkapita ditolak. Pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa pendapatan perkapita dari persamaan regresi linear berganda pada tabel diatas diketahui bahwa pendapatan perkapita memiliki t_{hitung} sebesar $1.133 < 1.695 t_{tabel}$ dengan nilai signifikan sebesar $0,266 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel. 4
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 ^a	.434	.361	.18410

Sumber: Data Diolah Penulis, 2018

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,434 atau 43,4%. Artinya variabel penerimaan pajak hotel (Y) di pengaruhi sebesar 43,4% oleh variabel Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2), Laju Inflasi (X3) dan Pendapatan Perkapita (X4). Sedangkan sisanya sebesar 56,6% di pengaruhi oleh variabel lain seperti jumlah penduduk dan tarif kamar rata-rata yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam pemungutan pajak hotel di kota Palembang tahun 2014-2016 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang. Artinya jika kunjungan wisatawan berkurang atau bertambah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang, karena istilah wisatawan sangat berhubungan dengan perjalanan wisata yang merupakan suatu perubahan tempat tinggal seseorang secara sementara diluar tempat tinggalnya, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara.
2. Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang, karena kurangnya minat masyarakat kota Palembang untuk menginap di hotel, karena rata-rata yang menginap di hotel adalah wisatawan-wisatawan domestik maupun mancanegara, serta Dinas Pariwisata yang masih kurang dalam mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang untuk menunjang kunjungan wisatawan ke kota Palembang.
3. Laju inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang, karena jika laju inflasi ringan maka harga sewa hotel dengan fasilitas terbaiknya akan tetap. Dengan harga sewa hotel yang tetap maka masyarakat berminat untuk menginap di hotel, dengan keadaan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Palembang.
4. Pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena disebabkan kenaikan output pendapatan perkapita tidak disertai peningkatan dari sektor perhotelan, sehingga pajak hotel yang di bayarkan tidak sebesar kenaikan output pendapatan perkapita tersebut, serta dipengaruhi kurangnya minat masyarakat kota Palembang untuk menginap di hotel. Walaupun pendapatan perkapitanya tinggi tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk menginap di hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk terus meningkatkan memperbanyak tempat-tempat wisata dan hiburan serta harus lebih sering mengadakan *event-event* baik nasional maupun internasional, serta meningkatkan promosi wisata-wisata yang ada di kota Palembang agar penerimaan pajak hotel di kota Palembang terus meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama agar menambah indikator lain sebagai variabel independen seperti jumlah penduduk dan tarif kamar rata-rata.

6. REFERENSI

- [1] Eko. Yuli. 2009. Ekonomi 1 : Untuk SMA dan MA kelas X. Pusat Perbukuan. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- [2] Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [3] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010. Tentang Pajak Hotel. Palembang Bagian Sekretaris. Jakarta

- [4] Republik Indonesia. Undang–Undang No 16 tahun 2009 . Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- [5] Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- [6] Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- [7] Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- [8] Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta
- [10] Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT. Refika Adimata.
- [11] Sofian. 1997. Pengertian Jumlah Penduduk. Jakarta : Alfabeta.
- [12] Sukirno. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [13] Sulstiyono. Agus. 2012. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung : Alfabeta.
- [14] Wihoho. 2006. Pariwisata Citra dan Manfaatnya. Jakarta Selatan : PT. Bina Rena Pariwa
- [15] Yani. Ahmad. 2007. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Edisi Revisi.